DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Julastiana. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.* Bali.

Kusumah, B. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* Jakarta: PT Gramedia.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Nazir, M. 2004. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ngazizah. 2012. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi.* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA). Surabaya.

Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, P. 2005. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Jakarta*: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Eresco.

Soeratno dan Lincolin, A. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. Yogyakarta: IPP AMP YKPN.

Suandy, E. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Suartana, I. Perbandingan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bis Universitas Udayana.* Bali.

Sugiono. 2012. Sistem Pemungutan Pajak Daerah di Tulungagung Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1, Juni 2012.

Suryabrata. 2005. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tjahyono, A dan Muhammad F. 2009. *Perpajakan.* Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.